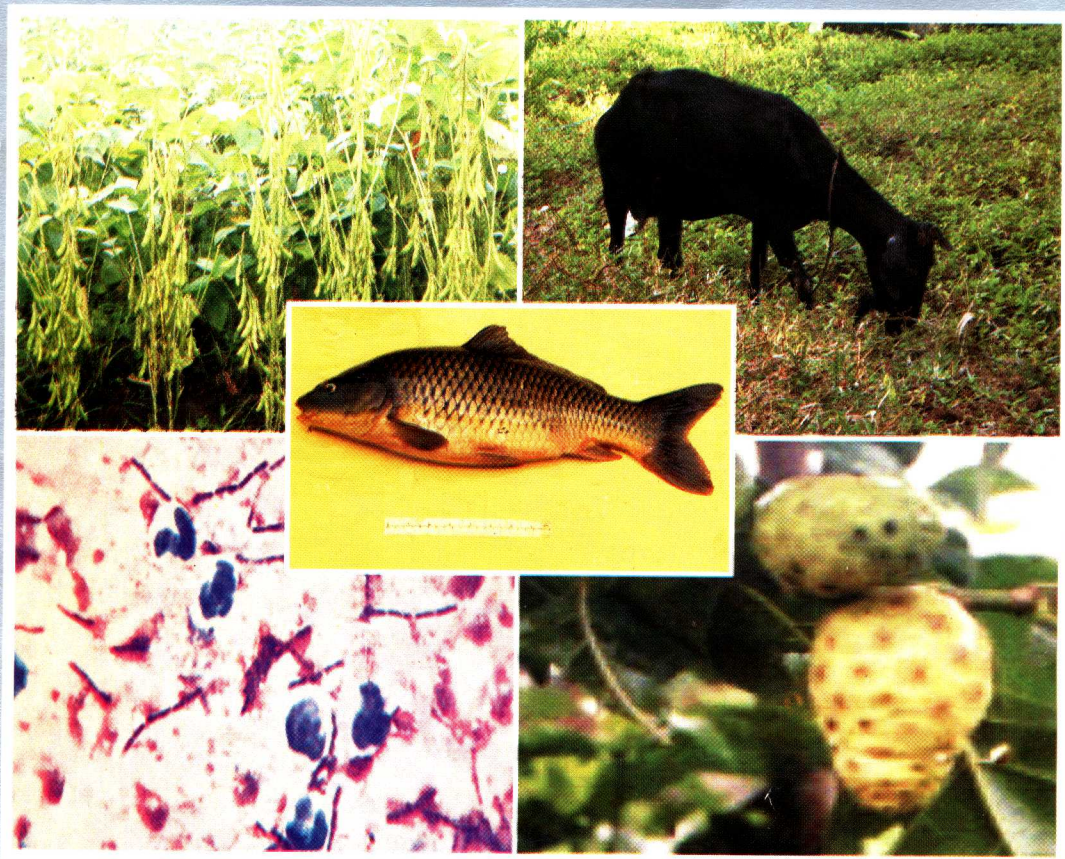


Buletin

Plasma Nutfah

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2002 (Edisi Khusus)

ISSN 1410-4377



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian

256
13/05 WING NO. 159
/10



ISSN 1410-4377

Buletin

Plasma Nutfah

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2002
(Edisi Khusus)

Penanggung Jawab

Ketua Komisi Nasional Plasma Nutfah

Kusuma Diwyanto

Dewan Redaksi

Sugiono Moeljopawiro

Surahmat Kusumo

Maharani Hasanah

Subandriyo

Redaksi Pelaksana

Husni Kasim

Hermanto

Ida N. Orbani

Alamat Redaksi

Sekretariat Komisi Nasional

Plasma Nutfah

Jalan Tentara Pelajar 3A Bogor 16111

Telp/Faks. (0251) 327031

E-mail: genres@indo.net.id

Buletin ilmiah *Plasma Nutfah*
diterbitkan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian secara
berkala, dua kali setahun, memuat
tulisan hasil penelitian dan tinjauan
ilmiah tentang eksplorasi, konservasi,
karakterisasi, evaluasi, dan utilisasi
plasma nutfah tanaman, ternak, ikan,
dan mikroba yang belum pernah
dipublikasi di media lain.

Daftar Isi

Penggunaan Bioteknologi dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah Tumbuhan untuk Perakitan Varietas Unggul	<i>Sumarno</i>	51
Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah untuk Meningkatkan Produktivitas Perikanan Budi Daya	<i>Fatuchri Sukadi</i>	58
Aspek Pendanaan dalam Pemberdayaan Plasma Nutfah	<i>Ato Suprpto</i>	66
Keanekaan Hayati dan Potensi Bioteknologi Mikroorganisme: Seberapa Jauh Kita Mengenalnya?	<i>Antonius Suwanto</i>	72
Pemanfaatan Plasma Nutfah dalam Industri Obat-obatan	<i>James M. Sinambela</i>	78
Pemanfaatan Plasma Nutfah dalam Industri Jamu dan Kosmetika Alami	<i>Heru D. Wardana</i>	84
Implementasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Pengelolaan Plasma Nutfah	<i>Krisnani Setyowati</i>	90
Pengaturan Akses terhadap Plasma Nutfah dan Pembagian Keuntungan secara Adil dan Merata	<i>Soenartono Adisoemarto</i>	102

Gambar sampul:

Kedelai (*Glycine max*) varietas Sinabung

Kambing Costa

Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.)

Koloni kuman/bakteri *Bacillus anthracis* dalam darah

Ikan Mas (*Cyprinus carpio*) strain Rajadanu



**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian**

Aspek Pendanaan dalam Pemberdayaan Plasma Nutfah

Ato Suprpto

Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Jakarta

ABSTRACT

Genetic resources utilization needs quite large financing. Besides others supporting aspects, such as land, laboratories, equipments, and expertises. The Directorate General of Bina Sarana Pertanian, is active in making finance and non financial available in supporting genetic resources utilization. The activities on genetic resources utilization are able to finance through banking and non-banking credit scheme, as long as the business technically, economically, and environmentally eligible. The banking credit scheme (executing pattern) can be financed from food security credit scheme for food crops intensification, plantation (sugar cane), and animal production which already commenced at the end of the year 2000. The financial source of agribusiness which are able to finance the genetic resources utilization are commercial credit scheme for public banking, government, and non-government, such as BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, Bukopin, and Bank Danamon. On the other hand, there are some banks offering syariah financing system, which, principally, the profit of the business are shared between the bank and the creditor. There are some others credit schemes which are available, for instance Kredit Investasi Kecil, Kredit Kecil Modal Kerja, Kredit Investasi, and Kredit Modal Kerja. The credit can be varied between Rp 50 millions for small scale business and Rp 5 billions for medium scale business, with commercial interest applied. The non-banking capital source come from the venture capital and the credit scheme of Agribusiness for Poor Farmers. The Agricultural Department is also facilitating the National Saving Movement for Agribusiness Development (Gemas Agribisnis). In the distribution of the credit capital, banks are expecting to collaborate with Micro Financing Institutions (LKM) to achieve the proper and smooth credit distribution. Those collaboration with LKM are to accompany the directed groups which utilizing the genetic resources.

Key words: Genetic resources, credit scheme, agribusiness.

ABSTRAK

Dalam pemberdayaan plasma nutfah diperlukan dana yang tidak sedikit. Selain itu, diperlukan pula dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Ditjen Bina Sarana Pertanian, turut berperan dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana bagi upaya pemberdayaan plasma nutfah. Untuk membiayai kegiatan pemberdayaan plasma nutfah dapat memanfaatkan skim kredit perbankan dan nonperbankan, sepanjang usaha

tersebut layak secara teknis, ekonomis, dan berwawasan lingkungan. Skim kredit perbankan (pola *executing*) dapat berasal dari skim kredit ketahanan pangan (KKP) untuk intensifikasi tanaman pangan, perkebunan (tebu), dan peternakan yang dimulai akhir tahun 2000. Sumber pembiayaan pengembangan agribisnis yang diperkirakan dapat digunakan untuk pemberdayaan plasma nutfah adalah skim kredit komersial yang disediakan oleh perbankan umum, pemerintah atau swasta, seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, Bukopin, Bank Danamon, dan sebagainya. Di samping itu, tersedia pula sumber pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh beberapa perbankan dengan pola bagi hasil. Beberapa skim kredit yang juga dapat dimanfaatkan antara lain adalah Kredit Kecil Investasi, Kredit Kecil Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Dana kredit yang dapat dipinjam mulai di bawah Rp 50 juta untuk usaha mikro sampai dengan Rp 5 miliar untuk usaha menengah dengan tingkat bunga komersial. Dari nonperbankan, sumber permodalan antara lain berasal dari modal ventura dan skim kredit Taskin Agribisnis. Departemen Pertanian juga mendorong terwujudnya Gerakan Menabung Nasional untuk Pengembangan Agribisnis (Gemas Agribisnis). Dalam penyaluran kredit, perbankan diharapkan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar penyaluran berlangsung lancar dan tepat sasaran. Kerja sama penyediaan sarana dan prasarana dengan LKM ini dimaksudkan sebagai pendamping bagi kelompok-kelompok binaan dalam pemberdayaan plasma nutfah.

Kata kunci: Sumber daya genetik, skim kredit, agribisnis.

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam peningkatan PDB, penyediaan pangan dan bahan baku industri, peningkatan ekspor dan devisa negara, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Dibandingkan dengan sektor lain, sektor pertanian terbukti memiliki ketangguhan dan keunggulan dalam masa krisis ekonomi, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang positif.

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan perlu didukung oleh keunggulan komparatif yang berbasis sumber daya domestik, yaitu sumber daya manusia dan alam termasuk sumber daya hayati.

Sumber daya hayati merupakan sumber plasma nutfah yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat.

Pengembangan dan peningkatan produksi pangan antara lain perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan produk, penerapan ilmu dan teknologi, rekayasa genetika untuk merakit varietas baru yang memiliki keunggulan, baik produksi, ketahanan terhadap hama dan penyakit, mutu dan sebagainya. Untuk itu, plasma nutfah memegang peranan penting. Pemberdayaan plasma nutfah secara terencana dan berkelanjutan akan mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Dalam pemberdayaan plasma nutfah diperlukan dana yang tidak sedikit untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan yang cukup mudah dan murah, baik dari dalam maupun luar negeri, merupakan faktor penting agar pemberdayaan plasma nutfah dapat optimal dan berkelanjutan.

Dalam beberapa dasawarsa lalu, cukup tersedia berbagai sumber dana yang murah dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program sektor pertanian. Namun sejak adanya Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dan adanya *Letter of Intent* antara Bank Indonesia dan IMF, sumber pembiayaan dari KLBI dihapus. Untuk itu, perlu digali sumber pembiayaan lain yang ada di perbankan, nonperbankan, dan sumber pembiayaan luar negeri yang murah dan tidak mengikat serta bekerjasama dengan berbagai lembaga donor yang peduli terhadap pemberdayaan plasma nutfah.

KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Menyadari posisi sektor pertanian sebagai roda penggerak pembangunan nasional khususnya pada masa dan pascakrisis perekonomian nasional, serta memperhatikan berbagai tantangan dan kondisi yang berlangsung saat ini, terutama untuk mengantisipasi era perdagangan bebas (lingkungan strategis), maka pembangunan pertanian menerapkan paradigma baru yang dituangkan ke dalam visi

pembangunan pertanian, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis.

Dengan visi tersebut, ke depan akan dibangun suatu sistem atau struktur agribisnis yang mencakup industri hulu pertanian, pertanian itu sendiri (usaha budi daya), industri hilir pertanian berikut jasa-jasa pendukungnya yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Di samping itu, juga dikembangkan usaha agribisnis yang mencakup usaha rumah tangga, usaha kelompok, usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi dan korporasi yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

Misi pembangunan pertanian antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana usaha pertanian dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sesuai fungsinya.
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian melalui dukungan sarana produksi, teknologi dan kelembagaan penyuluhan yang kokoh sebagai upaya mewujudkan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Memantapkan prakondisi pengelolaan dan melindungi keberadaan kawasan sumber daya alam dalam upaya mewujudkan kelestarian sumber daya alam.
4. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan agroindustri yang bertumpu pada keunggulan komparatif wilayah dan keunggulan kompetitif komoditas dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, nilai tambah, dan kesempatan kerja.
6. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada karakteristik wilayah dan keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan gizi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau.

7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan sistem agribisnis yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkerakyatan dan memiliki keunggulan komparatif wilayah.
8. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan agribisnis agar mampu berperan dalam mengelola potensi ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan wilayah.
9. Mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang ramah lingkungan dalam rangka mendorong terwujudnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan modern sebagai upaya mendukung terwujudnya sistem agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sebagai tujuan utama pembangunan pertanian adalah pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan. Dengan meningkatnya kemampuan daerah dalam membangun pertanian serta didukung oleh kebijakan ekonomi yang kondusif, diharapkan akan tumbuh usaha agribisnis yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, Departemen Pertanian melaksanakan dua program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Agribisnis. Dalam melaksanakan kedua program tersebut mutlak diperlukan dukungan dari hasil-hasil pemberdayaan plasma nutfah.

Seiring dengan berlangsungnya era pasar bebas dan meningkatnya produk impor hasil pertanian dengan mutu lebih baik dengan harga yang terjangkau masyarakat, perlu segera dilakukan langkah-langkah penelitian dan pengembangan rekayasa genetik untuk memperoleh varietas baru yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta layak secara ekonomis untuk dikembangkan. Apabila tidak dilakukan, maka Indonesia akan dibanjiri oleh produk impor dan lambat laun akan menekan produksi dalam negeri.

PERANAN SARANA PERTANIAN DALAM MENUNJANG PEMBERDAYAAN PLASMA NUTFAH

Berdasarkan visi dan misi Departemen Pertanian, visi Ditjen Bina Sarana Pertanian adalah tersedianya sarana pertanian yang optimal dalam upaya mewujudkan sistem agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Misinya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan sarana dan kelembagaan usaha pertanian yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.
2. Mendorong pemanfaatan air irigasi di lahan pertanian secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
3. Mendorong pengembangan industri alat dan mesin pertanian, dan memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha jasa alat dan mesin pertanian yang mandiri.
4. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan azas enam tepat.
5. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.
6. Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi, dan manajemen pembangunan sarana pertanian.

Penanganan sarana pertanian harus diarahkan secara terkoordinasi pada sasaran yang tepat, yaitu mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil, serta mendukung upaya peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemberdayaan plasma nutfah untuk menghasilkan produk baru juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai. Berdasarkan visi dan misi tersebut diketahui bahwa Ditjen Bina Sarana Pertanian berperan penting dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya pemberdayaan plasma nutfah untuk dapat menghasilkan produk akhir yang diharapkan. Untuk itu, perlu dilakukan perencanaan yang mantap secara terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menetapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, rencana operasional, pengelolaan dan pemanfaatan

produk akhir serta menyusun rencana pembiayaannya. Kajian secara ilmiah sebaiknya dilakukan sebelum kegiatan operasional dilaksanakan.

SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK PEMBERDAYAAN PLASMA NUTFAH

Skim kredit perbankan dan nonperbankan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan plasma nutfah sepanjang usaha tersebut layak secara teknis, ekonomis, dan berwawasan lingkungan. Sumber pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Sumber Pembiayaan dari Skim Kredit Program

Dana untuk skim kredit program saat ini berasal dari perbankan (pola *executing*), misalnya skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk intensifikasi tanaman pangan, perkebunan (tebu), dan peternakan, yang dimulai akhir 2000. Mengingat dananya berasal dari perbankan, maka perbankan perlu berhati-hati dalam penyalurannya (*prudential banking*) dengan persyaratan 5C, sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

Dalam kredit program ini berlaku tingkat bunga komersial sebesar 22% dengan subsidi pemerintah (6-10%), sehingga petani hanya membayar bunga 12% untuk usahatani tanaman pangan dan 16% untuk usaha perkebunan dan peternakan. Untuk itu, sebagai contoh, pemberdayaan plasma nutfah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, tebu, dan ternak dapat memanfaatkan KKP-padi, KKP-jagung, KKP-kedelai, dan seterusnya.

Sampai pada posisi 30 Juni 2002, penyaluran KKP baru mencapai Rp 634,9 miliar atau 30,5% dari plafon sebesar Rp 2,1 triliun. Hambatan dalam penyaluran kredit KKP antara lain adalah kebijakan BI mengenai perbankan, persyaratan agunan tambahan berupa sertifikat tanah dan adanya kelompok tani yang menunggak KUT. Persyaratan sertifikat tanah ini seringkali sulit dipenuhi oleh petani, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

Upaya percepatan penyaluran KKP terus dilakukan, antara lain dengan realokasi dana intensifikasi tanaman pangan untuk perkebunan/budi daya tebu (Rp 300 miliar) dan peternakan (Rp 100 miliar). Di samping itu, telah dilakukan kerja sama

kemitraan antara petani/kelompok tani, pengusaha saprodi, perbankan, lembaga penjamin/avalis, lembaga pemasaran, dan pemerintah daerah.

Pola kemitraan tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan untuk mendanai pemberdayaan plasma nutfah. Melalui kerja sama kemitraan dapat diatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku serta kemungkinan menerapkan pola-pola kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan.

Pemanfaatan Skim Kredit Komersial

Sumber pembiayaan yang juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan agribisnis adalah skim kredit komersial yang disediakan oleh perbankan umum, pemerintah atau swasta, seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, Bukopin, Bank Danamon, dan sebagainya. Di samping itu, tersedia pula pola pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh beberapa perbankan dengan pola bagi hasil.

Permasalahan pokok pemanfaatan skim kredit komersial ini adalah minimnya informasi mengenai pemberdayaan plasma nutfah, manfaat, dan kelayakannya. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan pemanfaatan skim kredit komersial perlu dilakukan tiga hal berikut:

- a. Penyampaian informasi potensi dan peluang komoditas unggulan ke perbankan,
- b. Menyusun rencana usaha dan kelayakannya,
- c. Memfasilitasi penyampaian rencana usaha bagi pelaku agribisnis ke perbankan.

Beberapa skim kredit yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah Kredit Kecil Investasi, Kredit Kecil Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Dana kredit yang dapat dipinjam mulai dari di bawah Rp 50 juta untuk usaha mikro sampai dengan Rp 5 miliar untuk usaha menengah dengan tingkat bunga komersial.

Pemanfaatan Skim Kredit Modal Ventura dan Taskin Agribisnis

Di samping sumber permodalan dari perbankan, terdapat sumber pembiayaan yang berasal dari nonperbankan, antara lain modal ventura dan skim kredit Taskin Agribisnis. Dalam memanfaatkan modal ventura, sejak 1996 Departemen Pertanian telah bekerja sama dengan PT. Bahana Artha

Ventura untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Sampai dengan Mei 2002, penyaluran modal ventura untuk pertanian mencapai Rp 254 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 1.335 kelompok.

Skim kredit Taskin Agribisnis diluncurkan sejak tahun 1999 yang dibiayai oleh Yayasan DAKAP dan Yayasan Sejahtera Mandiri. Penyaluran skim kredit ini melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan sasaran masyarakat Prasejahtera dan Sejahtera I. Sampai Mei 2002, penyaluran skim kredit ini mencapai 114,05 miliar atau 87,6% dari dropping dana sebesar Rp 130,24 miliar, yang melibatkan 6.421 kelompok dengan jumlah anggota 94.393 orang. Sumber dana dari perbankan dapat berupa kredit program dan sumber pembiayaan berasal dari berbagai skim kredit.

Pemanfaatan Laba BUMN

Sumber pendanaan ini berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang ada di Indonesia untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun tingkat suku bunga yang berlaku bervariasi atau sekitar 6% per tahun. Sampai dengan Mei 2002, total dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang terkumpul dari 145 BUMN telah mencapai Rp 2.911 miliar. Dari jumlah tersebut, dana dari PT. Perkebunan Nusantara mencapai Rp 128,2 miliar dan telah disalurkan sekitar Rp 44.615 juta kepada 4.043 unit agribisnis dan sekitar Rp 77.822 juta kepada 5.027 unit usaha nonagribisnis.

Pemanfaatan Lembaga Keuangan Mikro

Selama ini telah berkembang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di daerah-daerah seluruh wilayah Indonesia, baik yang pengawasannya melalui UU Perbankan (BRI Unit dan BPR), dan UU Perkoperasian (Koperasi Simpan Pinjam, KUD, Koperasi Kredit, dan lain-lain), maupun yang dibina oleh LSM dan instansi pemerintah (KSM, P4K, Delivery, dan lain-lain). Perkembangan LKM dinilai cukup signifikan dan terus berkembang. Data yang ada di Bank Indonesia menunjukkan jumlah LKM yang ada (tidak termasuk BRI Unit) lebih dari 15.000 unit dengan volume usaha mencapai lebih dari Rp 7 triliun.

Mengingat LKM-LKM tersebut umumnya berada di daerah dan dekat dengan masyarakat pertanian, maka lembaga ini dapat merupakan salah satu alternatif pembiayaan di sektor pertanian, termasuk, untuk pemberdayaan plasma nuffah. Di masa mendatang, idealnya terdapat lembaga pembiayaan yang khusus membiayai sektor pertanian, terutama untuk pengembangan usaha agribisnis. Untuk maksud tersebut pada tahun ini mulai dirintis studi kelayakannya dengan dana dari Pemerintah Perancis.

Pemanfaatan Dana Simpanan Masyarakat

Guna meningkatkan ketersediaan sumber permodalan di masyarakat diperlukan upaya mendorong kegairahan masyarakat untuk pemupukan modal. Untuk itu, Departemen Pertanian akan mendorong terwujudnya Gerakan Menabung Nasional untuk Pengembangan Agribisnis (Gemas Agribisnis). Akumulasi dana Gemas Agribisnis diharapkan menjadi modal dalam mengembangkan agribisnis sehingga terbangun kemandirian permodalan di pedesaan.

Gerakan menabung dapat dimulai dari kalangan masyarakat yang mampu dan memiliki kepedulian terhadap pengembangan agribisnis, seperti para pegawai/karyawan, pengusaha, petani/nelayan maju, pedagang, pengrajin, dan sebagainya. Selanjutnya gerakan tersebut dapat lebih disosialisasikan kepada masyarakat umum, termasuk para petani dan nelayan.

Dana yang terkumpul melalui gerakan tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan perlu dipantau secara berkelanjutan, sehingga tidak terjadi *capital outflow* dari pedesaan. Untuk itu, pihak perbankan yang terlibat perlu mengalokasikan secara tegas penyaluran kreditnya pada setiap subsistem agribisnis dan pihak perbankan dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanannya agar terjadi keseimbangan antara jumlah simpanan dan pinjaman. Sebagai contoh, Simpedes telah berhasil menghimpun dana masyarakat sekitar Rp 21 triliun, namun penyaluran kredit melalui Kupedes baru mencapai sekitar Rp 11 triliun.

Dalam penyaluran kredit, perbankan diharapkan bekerja sama dengan LKM agar penyaluran

berlangsung lancar dan tepat sasaran. Kerja sama penyediaan sarana dan prasarana dengan LKM ini dimaksudkan pula sebagai pendampingan bagi kelompok-kelompok binaan dalam pemberdayaan plasma nutfah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemberdayaan plasma nutfah merupakan faktor strategis sumber gen dalam rekayasa genetik dan penemuan varietas unggul baru dalam mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis dalamantisipasi peningkatan kebutuhan bahan pangan danantisipasi era pasar global.
2. Dalam memberdayakan plasma nutfah, peranan sarana pertanian dinilai cukup strategis yang secara terkoordinasi mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil.
3. Dalam memberdayakan plasma nutfah, sumber permodalan merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha tersebut. Namun sejak adanya UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dan *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan IMF, maka ketersediaan KLBH dihapus, sehingga sumber pembiayaan yang murah menjadi terbatas. Untuk itu, perlu diupayakan sumber-sumber pembiayaan dari perbankan, nonperbankan dan kerja sama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri.